



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI YANTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, UMUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUANGAN**
3. NHK : **251403**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/120 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **966.800.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ZENIX HYBRID TYPE Q Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **288.000.000**

D. SURAT BERTAGIH Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **500.074.365**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.504.874.365**

III. HUTANG Rp. **450.500.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.054.374.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.